

**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan  
Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada  
Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018)**

Inez Novindriastuti  
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta  
ineznovin@gmail.com

Nasyiah Hasanah Purnomowati  
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

**ABSTRAK:** Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Proporsi Belanja Modal, Kemakmuran, dan Jumlah BUMD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 34 Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2014-2018. Metode pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (*sensus*) sehingga diperoleh 170 observasi. Metode penelitian dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2014-2018 yang diterbitkan oleh DJPK serta data statistik yang diterbitkan oleh BPS. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel proporsi belanja modal berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan jumlah BUMD juga berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Pemerintah Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan, Belanja Modal, Kemakmuran dan BUMD.

**Abstract:** The purpose of this study is to determine the factors that influence the financial independence of local governments as a strengthening of fiscal decentralization. The population and sample in this study were 34 Provincial Regional Governments

in Indonesia with the 2014-2018 research period. The sampling method uses saturated sampling (*census*) to obtain 170 observations. The research method and hypothesis testing using panel data regression analysis with *eviews* program. This study uses secondary data which consists of the Realization Report of the Provincial Government's APBD in Indonesia in the 2014-2018 fiscal year published by the DJPK and also statistical data published by BPS. The results of this study indicate that the contribution does not affect financial independence, prosperity has a negative influence on financial independence, and the number of BUMDs does not affect financial independence.

**Keywords:** *Financial Independence, Fiscal Decentralization, Local Government, Capital Expenditures, Prosperity and BUMD.*

## **PENDAHULUAN**

Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi turut mengubah kebijakan dan kewenangan pada pemerintah daerah. Pada sistem sentralisasi pembangunan tidak merata sehingga dinilai kurang efisien. Sedangkan pada system desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam upaya pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Mogues dan Benin, 2012). Desentralisasi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Akai dan Sakata 2002). Dalam kegiatan pemerintahan terdapat tiga fungsi yang dibagi untuk tujuan konseptual berupa fungsi alokasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilisasi, pada fungsi alokasi inilah di mana sebagian besar manfaat desentralisasi muncul (Stein 1999).

Kebijakan desentralisasi tidak hanya desentralisasi teritorial, tetapi diikuti dengan desentralisasi dalam anggaran atau disebut juga dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pengalokasian keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah, serta memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan dilakukan pemerataan sesuai proporsi dan adil seiring dengan kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepada daerah (Badan Kebijakan Fiskal dan World Bank, 2011). Sehingga tidak hanya terfokus kepada dana perimbangan tetapi juga kemampuan daerah dalam mengelola potensinya (Hirawan, 2006).

Desentralisasi fiskal bertujuan memaksimalkan efisiensi sektor publik, baik dari sisi transparansi dan akuntabilitas, maupun dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan (DeMello, 2000). Seperti halnya dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada pidato penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan 2019, salah satu porsi belanja negara tahun 2019 dialokasikan untuk penguatan desentralisasi fiskal. Dengan demikian pemerintah pusat mempercayakan kepada daerah untuk mandiri mengelola kewenangan yang diberikan.

Berbeda dengan Borge et al (2014), daripada mendapatkan otonomi untuk menetapkan belanja dan pajak, pemerintah daerah seringkali memilih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai penyediaan barang publik. Di Indonesia menurut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dalam Nugraha (2019), keadaan sebenarnya memperlihatkan belum semua pemerintah daerah meraih tingkat kemandirian keuangan yang diinginkan. Tidak sedikit pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai ketergantungan pada dana perimbangan. Seperti dilihat dari data dibawah ini yang diolah dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) tentang kemandirian keuangan daerah provinsi tahun 2017 bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah sebagian besar masih tergolong rendah yaitu kurang dari 50% (Hersey dan Blanchard dalam Halim, 2004).

Gambar 1. Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2017



Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Penguatan desentralisasi fiskal seharusnya mendorong pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan semaksimal mungkin secara sendiri. Jika pengelolaan keuangan pemerintah daerah berhasil secara sendiri dan baik, maka pemerintah daerah tersebut dikatakan telah mandiri. Halim (2013) menyatakan bahwa daerah dalam pengelolaan keuangannya memiliki indikator kinerja dalam penilaian pemerintah daerah, salah satunya bisa dilakukan pada APBD yang sudah disahkan dengan menganalisis rasio keuangannya. Dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, salah satu indikatornya yaitu kemandirian keuangan daerah.

Groves et al (2001) menguji faktor apa saja yang berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana kemandirian keuangan daerah adalah indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Pada penelitiannya, beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari faktor keuangan (financial factors) dan faktor lingkungan (environmental factors) yang keduanya tidak dapat dipisahkan dari faktor organisasional (organizational factors). Kemudian diperoleh hasil baik faktor lingkungan, faktor keuangan ataupun faktor organisasional berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu di Indonesia, ada beberapa faktor yang terbukti berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian Ariani dan Putri (2016), belanja modal secara positif mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sedangkan penelitian Imawan dan Wahyudin (2014) menemukan belanja modal secara negative mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Karena adanya perbedaan hasil temuan penelitian lalu peneliti tertarik untuk meneliti kembali namun dengan menggunakan proporsi belanja modal pada belanja daerah dengan harapan bisa memperoleh hasil yang lebih akurat.

Selanjutnya penelitian Imawan dan Wahyudin (2014) serta Susanto dan Murtini (2015) menemukan bahwa wealth berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah secara positif. Pengukuran kemakmuran pada penelitian tersebut diukur dengan

proxy PDRB suatu daerah, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proxy lain yaitu dengan PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan alat ukur yang lebih mencerminkan keadaan pada rata-rata penduduk serta standar hidup masyarakatnya (Mankiw : 2006). Peneliti juga menambahkan satu variabel yaitu jumlah BUMD dengan harapan penelitian bisa lebih variatif agar bisa diketahui faktor-faktor lainnya yang berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal.

Penelitian ini adalah pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan perbedaan rentan waktu penelitian tahun 2014-2018, hal ini dikarenakan dengan menggunakan data terkini, penelitian diharapkan dapat lebih menggambarkan keadaan terkini. Penelitian ini mengambil wilayah Provinsi di Indonesia dikarenakan sesuai dengan tujuan desentralisasi, bukan hanya pemerintah kabupaten/kota saja yang didorong untuk mandiri, namun pemerintah daerah provinsi juga demikian.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Desentralisasi**

Desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah (Rondinelli *et al* 1983). Menurut Campo dan Sundaram (2001) desentralisasi bertujuan untuk kestabilan politik (*political stability*), keefektifan pemberian pelayanan publik (*effective service delivery*), pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*), dan menciptakan keadilan atau kesetaraan (*equity*). Terdapat empat dimensi dalam desentralisasi, yaitu desentralisasi geografi, desentralisasi, desentralisasi fungsional, desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal.

Di era otonomi daerah tidak hanya sekedar melaksanakan perintah dari pusat, tetapi seharusnya terdapat keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam menggali potensi yang sebelumnya tidak berkembang (Mardiasmo, 2002). Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal sehingga terjadi peningkatan kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa publik (Jia *et al*, 2020). Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing (Sidik, 2002). Hubungan teori desentralisasi dengan kemandirian keuangan daerah yaitu pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah daerah mengembangkan potensi daerah agar dapat menambah pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya sehingga dengan demikian dapat terciptalah suatu kemandirian keuangan daerah.

### **Desentralisasi Pemerintah Daerah**

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi pada pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Klasifikasi urusan pemerintahannya terbagi menjadi urusan pemerintahan secara absolut, urusan pemerintahan secara konkuren dan urusan pemerintahan secara umum. Yang menjadi prinsip dasar dalam pembagian antara pemerintah pusat dan daerah yaitu prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membagi tiga sumber APBD menurut urusan pemerintahan yaitu, belanja, pendapatan, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah penerimaan yang didapat oleh daerah di mana menambah jumlah kekayaan daerah bersih dalam satu periode dan daerah tidak melakukan pembayaran kembali. Belanja daerah yaitu seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan daerah akan memperoleh kembali pembayarannya. Pembiayaan daerah pada tahun anggaran yang sama atau tahun anggaran selanjutnya yaitu, untuk penerimaan pembiayaan, daerah wajib melakukan pembayaran kembali dan untuk pengeluaran, daerah wajib memperolehnya kembali.

### **Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja merupakan hasil yang baik yang bisa diperoleh suatu organisasi pada suatu periode. Kinerja adalah penilaian sesuai atau tidaknya antara pelaksanaan dari program dengan sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut (Bastian, 2006). Sehingga penilaian bukan hanya dilakukan pada masukan saja tetapi juga keluaran dari program tersebut.

Salah satu manfaat dari penilaian kinerja yaitu untuk menilai pencapaian kinerja lalu dibandingkan dengan target yang sudah disahkan sebelumnya lalu dilakukan koreksi untuk perbaikan kinerja selanjutnya (Mardiasmo, 2002). Pengukuran rasio keuangan bisa digunakan sebagai penilaian kinerja pemerintah daerah (Halim, 2007). Rasio keuangan yang dimaksud diantaranya rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio kemandirian dan rasio efisiensi.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian Keuangan Daerah yaitu keadaan saat daerah mampu mencukupi program pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat dengan sendiri diperoleh melalui pembayaran retribusi maupun pajak yang merupakan hasil dari pengelolaan potensi dan pendapatan asli daerah (Halim, 2001). Tentunya harus sejalan dengan asas desentralisasi. Hubungan keuangan pusat dan daerah dinilai baik saat pendapatan asli daerah bisa menyokong sebagian besar dari total pendapatan daerah daripada sumber lainnya.

Pada realitanya banyak daerah pada pendapatan asli daerahnya tidak bisa mencukupi pengeluaran secara keseluruhan. Padahal proporsi pendapatan asli daerah

pada jumlah pendapatan daerah merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2004) pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pemberlakuan otonomi daerah dibagi menjadi pola hubungan instruktif di mana kemandirian hanya pada angka 0-25% dan kemampuan keuangannya masih rendah sekali. Lalu pola hubungan konsultif yaitu kemandirian pada angka 25-50% dan kemampuan keuangan masih rendah. Kemudian pola hubungan partisipatif yaitu kemandirian mencapai 50-75% dan kemampuan keuangan mencapai tingkat sedang. Lalu pola hubungan delegatif di mana kemandirian sudah mencapai 75-100% serta kemampuan keuangannya sudah tinggi.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Diwajibkan setiap pemerintah daerah menerbitkan laporan tahunan berupa laporan keuangan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen dari laporan realisasi anggaran dibagi menjadi belanja, pendapatan, transfer, dan pembiayaan. Belanja Daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. Pembiayaan Daerah yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

### **Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran daerah untuk pembentukan modal berupa menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Di dalamnya termasuk juga biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, kapasitas dan kualitas dari aset tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran membagi belanja modal menjadi enam yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja lainnya dan belanja Badan Layanan Umum.

Desentralisasi merupakan pemindahan tanggung jawab pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Campo dan Sundaram, 2001). Dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk mengalokasikan besaran belanja. Belanja modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk menempatkan dana investasinya di daerah tersebut. Hal tersebut mempunyai dampak terhadap kenaikan pendapatan asli daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Ariani dan Putri (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan kualitas layanan publik yang memuaskan selalu diikuti dengan tingginya partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Belanja modal kemudian diwujudkan ke dalam pembangunan daerah dan perbaikan daerah di berbagai sektor. Dengan demikian belanja modal dapat mempengaruhi tingkat kemandirian daerah.

Menurut Seknas FITRA (2017), salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah yang merupakan faktor utama dari kemandirian keuangan daerah.

H1 : Proporsi belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan.

### **Kemakmuran**

Kemakmuran merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator pengukuran kemakmuran pada suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu diantaranya dilihat dari produk domestik bruto, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi (Blanchard, 2012).

Salah satu tujuan dari desentralisasi menurut Campo dan Sundaram (2001) mengemukakan bahwa desentralisasi penting untuk pengurangan kemiskinan (poverty reduction). Salah satu cara pengurangan kemiskinan yaitu dengan meningkatkan kemakmuran pada daerahnya. Kemakmuran salah satunya dapat dilihat melalui PDRB Perkapita, semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dengan demikian akan menunjukkan peluang bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.

Imawan dan Wahyudin (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh wealth terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif wealth terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalan di daerah tersebut. PDRB yang tinggi mengindikasikan kegiatan ekonomi daerah bergeliat dengan baik, dengan begitu jumlah pemasukan pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Banyaknya faktor produksi yang muncul tersebut akan memunculkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi yang menjadi pemasukan bagi kas daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi akan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.

H2 : Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan.

### **Badan Usaha Milik Daerah**

Dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu diantaranya adalah kewenangan dalam membentuk BUMD. BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan desentralisasi. Kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. BUMD juga memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap semaksimal mungkin untuk pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD merupakan badan usaha yang modalnya baik seluruh maupun sebagian besar milik daerah. BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah di mana seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak dibagi atas saham; dan perusahaan perseroan daerah yaitu berbentuk perseroan terbatas yang membagi saham seluruhnya atau paling sedikit 51% saham milik daerah sebagai modalnya. Menurut kepemilikan saham terbesarnya, BUMD dibagi menjadi dua yaitu BUMD milik Pemerintah Provinsi dan BUMD milik Pemerintah Kabupaten/Kota, laba yang diperoleh sesuai dengan kepemilikan saham pada masing-masing BUMD tersebut.

Wulandari (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Di mana dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan komponen dari kemandirian keuangan daerah. Menurut Wicaksono (2018) pemerintah daerah seharusnya bisa mengoptimalkan pembentukan dan penggunaan badan usaha milik daerah (BUMD). Hal tersebut justru lebih bisa memberikan efek lebih besar pada pendapatan daerah. Dimana akan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Semakin banyak jumlah BUMD pada suatu daerah diharapkan akan meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian kemandirian keuangan daerah meningkat.

H3 : Jumlah BUMD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, di mana data dinyatakan dengan angka, skor, dan dianalisis dengan statistik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari Proporsi Belanja Modal,

Kemakmuran dan Jumlah BUMD pada Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian mengacu terhadap kinerja 34 pemerintah daerah provinsi periode 2014-2018, sehingga jumlah observasi adalah 170 data observasi. Penelitian ini memakai data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Provinsi di Indonesia yang didapatkan pada website [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) serta data statistik pada website [bps.go.id](http://bps.go.id).

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah dan variabel independen yaitu 1) Proporsi Belanja Modal, 2) Kemakmuran dan 3) Jumlah BUMD. Kemandirian keuangan daerah yaitu ketika daerah mampu mencukupi sendiri program pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dari pengelolaan pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pengukuran kemandirian keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Data ini didapatkan pada website [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id).

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Variabel independen pertama yaitu proporsi belanja daerah. Belanja daerah yaitu seluruh pengeluaran untuk pembentukan modal bersifat menambah aset serta biaya pemeliharaan aset tersebut guna menambah masa manfaatnya. Pengukuran proporsi belanja modal dengan pembagian antara belanja modal dengan total belanja daerah. Data ini diperoleh dari website [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id).

$$\text{Proporsi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}}$$

Variabel independen kedua yaitu kemakmuran. Untuk melihat kemakmuran di suatu daerah, PDRB perkapita adalah salah satu indikatornya. PDRB perkapita adalah rerata pendapatan yang didapat setiap penduduk selama satu tahun pada suatu daerah. Data diperoleh dari website [bps.go.id](http://bps.go.id) pada bagian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi. Variabel independen ketiga yaitu jumlah BUMD. BUMD diperlukan bagi daerah sebagai sarana pemberian pelayanan bagi masyarakat. BUMD memiliki kedudukan penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran variabel berdasarkan jumlah BUMD dalam suatu daerah. Data jumlah BUMD setiap provinsi di Indonesia dapat diperoleh pada publikasi Badan Pusat Statistik di website [bps.go.id](http://bps.go.id) bagian statistik keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *sampling jenuh (sensus)* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Periode penelitian yang dipilih tahun 2014-2018 sehingga observasi sebanyak 170 observasi.

### Uji Statistik

Penelitian ini menggunakan uji statistik berupa statistik deskriptif untuk menjelaskan data penelitian. Untuk uji asumsi klasik digunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya analisis regresi dengan menggunakan analisis regresi data panel. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik t, uji statistik F dan koefisien determinasi. Alat uji penelitian ini menggunakan Eviews.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan variabel penelitian dilihat dari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	Mean	Maximum	Minimum	Std.Devias i
Proporsi Belanja Modal	18.35179	35.30897	6.035376	6.183525
Kemakmuran	15.28040	17.02759	14.12298	0.566310
Jumlah BUMD	2.045708	5.261319	0.000000	1.290862
Kemandirian Keuangan Daerah	37.63531	76.19714	0.781965	17.41463
Observations	170	170	170	170

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sampel yang diuji sebanyak 170 observasi. Variabel independen proporsi belanja modal yang diukur melalui rasio belanja modal dengan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 18,35, nilai maksimum sebesar 35,31, nilai minimum sebesar 6,035 dan standar deviasi sebesar 6,18. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari proporsi belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 18,35. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti yaitu sebaran data bersifat homogen. Nilai deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun nilai terendah sebesar 6,035 pada Provinsi Jawa Timur dan nilai tertinggi sebesar 35,31 pada Provinsi Kalimantan Utara.

Variabel independen kemakmuran yang diukur melalui logaritma PDRB perkapita pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 15,28, nilai maksimum sebesar 17,03, nilai minimum sebesar 14,12 dan standar deviasi sebesar 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari kemakmuran pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 15,28. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti yaitu sebaran data bersifat homogen. Nilai deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun dengan nilai terendah sebesar 14,12 pada Nusa Tenggara Timur dan nilai tertinggi sebesar 17,03 pada Provinsi DKI Jakarta.

Variabel independen jumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 yang transformasikan ke dalam bentuk MSI (Method of Successive Interval) untuk menyamakan satuan data, memiliki rata-rata sebesar 2,045, nilai maksimum sebesar 5,26, nilai minimum sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1,29. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari jumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 2,045. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti yaitu sebaran data bersifat homogen. Nilai deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun nilai terendah sebesar 0 pada Provinsi Aceh, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Barat. Lalu nilai tertinggi sebesar 5,26 pada Provinsi Jawa Tengah.

Variabel dependen kemandirian keuangan daerah yang diukur melalui rasio pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 37,63, nilai maksimum sebesar 76,20, nilai minimum sebesar 0,78 dan standar deviasi sebesar 17,41. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018 sebesar 37,63. Dibandingkan dengan variabel lain, perbandingan antara nilai maksimum dan minimum kemandirian keuangan daerah yaitu 76,20 dan 0,78 menunjukkan rentang data yang cukup jauh. Adapun nilai terendah sebesar 0,78 pada Provinsi Kalimantan Utara dan nilai tertinggi sebesar 76,20 pada Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, persebaran data penelitian ini baik, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 17,41 lebih kecil dari nilai mean. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti yaitu sebaran data bersifat homogen. Nilai deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil.

### **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Model regresi data panel merupakan jenis data yang memiliki karakteristik gabungan data time series dan cross section. Terdapat tiga model pendekatan yang

digunakan yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Pemilihan model berdasarkan penggunaan asumsi yang digunakan oleh peneliti dan syarat-syarat pengolahan data statistik yang harus dipenuhi agar diperoleh hasil yang tepat (Gujarati, 2010). Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan model yang sesuai dengan penelitian.

Pemilihan model regresi dimulai dengan melakukan uji chow untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F statistik dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.

Tabel 2. Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	73.731132	(33,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	503.166689	33	0.0000

Sumber : Data diolah (2020)

Keterangan : Tingkat signifikan = 5%

Tabel 2 merupakan hasil uji chow dan menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti model terpilih dari uji chow ini adalah fixed effect, maka selanjutnya akan dilakukan uji hausman untuk menentukan model akhir yang akan digunakan dalam penelitian.

Uji hausman dilakukan untuk memilih model yang akan digunakan yaitu antara fixed effect dan random effect. Apabila nilai statistik chi-square kurang dari 0,05 maka model yang akan digunakan adalah fixed effect. Namun jika nilai statistik chi-square lebih dari 0,05 maka model yang terpilih adalah random effect.

Tabel 3. Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	64.882454	3	0.0000

Sumber : Data diolah (2020)

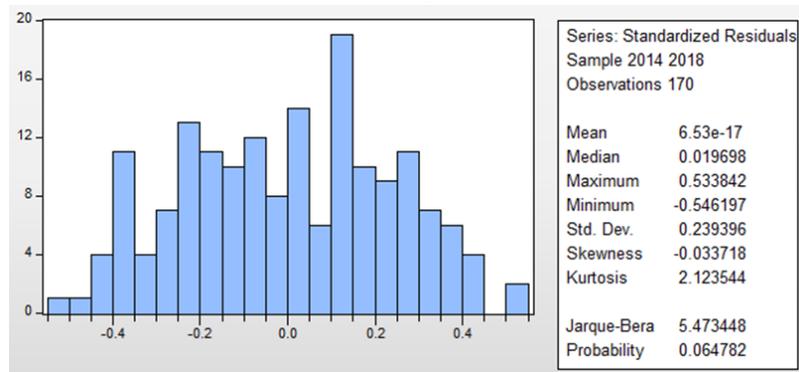
Keterangan : Tingkat signifikan = 5%

Tabel 3 menunjukkan hasil uji Hausman dimana nilai probabilitas chi-square statistik sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil menyimpulkan bahwa model regresi yang terpilih untuk penelitian ini adalah fixed effect.

### Uji Normalitas

Uji ini untuk mengetahui distribusi data penelitian, Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari uji normalitas lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,064782, dengan demikian data penelitian terdistribusi normal.

Tabel 4 Uji Normalitas



Sumber : Data diolah, 2020

### Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas yaitu dengan variance inflation factors. Jika dari hasil pengujian terdapat nilai centered VIF yang lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinieritas. Pada tabel 4.6 terdapat nilai VIF dibawah 10, sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Variable	Centered VIF
Proporsi Belanja Modal	1.153240
Kemakmuran	1.008427
Jumlah BUMD	1.144984

Sumber : Data diolah, 2020.

### Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W).

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat
1,700665

Sumber : Data diolah, 2020.

Pada penelitian didapatkan hasil DW Test (Durbin Watson stat) sebesar 1.700665. Nilai  $d_u$  dan  $d_l$  adalah 1,6519 dan 1,2707, sedangkan nilai  $4-d_u$  adalah 2,3481. Hasil nilai DW terletak diantara nilai  $d_u$  dan  $4-d_u$  ( $1,6519 < 1,700665 < 2,3481$ ) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi panel tidak ada autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila nilai prob. Chi Square  $> 0.05$ .

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas  
Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.264783 Prob. F(1,167)	0.6075
Obs*R-squared	0.267530 Prob. Chi-Square(1)	0.6050

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai prob. Chi Square sebesar 0,6050. Karena nilai prob. Chi Square lebih dari 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu uji statistik F, uji koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ), dan uji t (pengujian parsial terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8 Pengujian Hipotesis *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	385.3156	106.3635	3.622631	0.0004
PROPORSI_BELANJA_				
MODAL	-0.107665	0.081555	-1.320147	0.1891
LOG(KEMAKMURAN)	-22.68551	6.960598	-3.259132	0.0014
JUMLAH_BUMD	0.459115	1.028931	0.446206	0.6562
R-squared	0.975892			
Adjusted R-squared	0.968417			
F-statistic	130.5497			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah, 2020.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel melalui perbandingan model pengujian untuk memilih model yang paling cocok. Dalam penelitian ini, hasil dari Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan bahwa model yang terpilih yaitu Fix Effect Model (FEM). Persamaan regresi dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

$$KKD = 385,3156 - 0,107665 B - 22,68551 K + 0,459115 J + e$$

### Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model penelitian yang digunakan tepat atau tidak. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi F pada tingkat 5%. Hasil pengujian statistik F menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, maka persamaan pada model penelitian dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis selanjutnya. Dan model penelitian cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja modal, kemakmuran dan jumlah BUMD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen (Winarno, 2015). Berdasarkan Tabel 4.9 didapatkan nilai adjusted R-square sebesar 0,968417. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel proporsi belanja modal, kemakmuran dan jumlah BUMD mampu menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 96,84%, sedangkan sisanya 3,16% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

### Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, variabel independen dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen apabila nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansinya yaitu 5% dilihat secara parsial. Hasil pengujian statistik t ditunjukkan Tabel 4.9 dan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien variabel proporsi belanja modal sebesar -0,107665 dan nilai probability dari variabel proporsi belanja modal sebesar 0,1891. Dikarenakan nilai probability lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ( $0,1891 > 0,05$ ), maka H1 tidak terdukung, yang berarti proporsi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018.

- b. Nilai koefisien variabel kemakmuran sebesar -22,68551 dan nilai probability dari variabel kemakmuran sebesar 0,0014. Dikarenakan nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau ( $0,0014 < 0,05$ ), maka H2 tidak terdukung, yang berarti kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan Daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014- 2018.
- c. Nilai koefisien variabel BUMD sebesar 0,459115 dan nilai probability dari variabel BUMD sebesar 0,6562. Dikarenakan nilai probability lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ( $0,6562 > 0,05$ ), maka H3 tidak terdukung, yang berarti BUMD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018.

### **Pembahasan**

Proporsi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel proporsi belanja modal sebesar - 0,107665 dan nilai probability dari variabel proporsi belanja modal sebesar 0,1891. Dikarenakan nilai probability lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ( $0,1891 > 0,05$ ).

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dengan proporsi belanja daerah yang diharapkan lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di tiap daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proporsi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018. Hal tersebut berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Meningkatnya pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dari kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut diduga karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD (Imawan dan Wahyudin, 2014). Fenomena tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah.

Serta belanja modal yang tidak tepat sasaran dan lebih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif yang mana tidak menambah pendapatan asli daerah tetapi justru menjadi beban pada dana alokasi umum yang membuat daerah menjadi ketergantungan terhadap pusat (Apriana dan Suryanto, 2010). Seperti pembelian tanah atau bangunan sebagai aset daerah tetapi tidak dikelola dengan baik dengan demikian hanya akan menjadi aset terbengkalai dan tidak akan menambah pendapatan asli daerah yang akan menjadikan daerah tersebut mandiri. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriana dan Suryanto (2010) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun hasil ini tidak

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) bahwa terdapat pengaruh positif belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2014.

Kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kemakmuran sebesar -22,68551 dan nilai probability dari variabel kemakmuran sebesar 0,0014. Dikarenakan nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau ( $0,0014 < 0,05$ ).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018. Pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi fiskal seharusnya lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi melalui pendapatan daerah. Namun tidak demikian, meningkatnya kemakmuran tidak selalu diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dari kemandirian keuangan daerah. Kemakmuran yang dalam penelitian ini diprosikan dengan PDRB perkapita di mana nilai tambah PDRB perkapita salah satunya yaitu dari kombinasi faktor produksi (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2019). Perbedaan faktor produksi yang dimiliki tiap provinsi juga dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yang berbeda-beda pula. Selain itu, provinsi-provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi regional tinggi belum tentu memiliki PDRB per kapita yang tinggi pula, karena dalam menghitung PDRB per kapita selain ditentukan oleh tinggi rendahnya PDRB suatu wilayah juga ditentukan oleh jumlah penduduk wilayah tersebut (Prasasti, 2006). Hal ini berpotensi terdapat faktor-faktor diluar yang dapat meningkatkan kemakmuran di masyarakat, dengan demikian meningkatnya kemakmuran belum tentu meningkatkan pendapatan asli daerah dimana pendapatan asli daerah merupakan komponen dari kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imawan dan Wahyudin (2014) bahwa terdapat pengaruh positif wealth terhadap kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012 dan Susanto dan Murtini (2015) bahwa terdapat pengaruh positif wealth terhadap kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013.

Jumlah BUMD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil perhitungan dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel jumlah BUMD sebesar 0,459115 dan nilai probability dari variabel jumlah BUMD sebesar 0,6562. Dikarenakan nilai probability lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ( $0,6562 > 0,05$ ).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah BUMD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada

tahun 2014-2018. Hal ini lebih disebabkan, kondisi dari sebagian besar perusahaan daerah masih belum mampu memberikan keuntungan yang diharapkan karena pengelolaan BUMD yang ada belum optimal dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah padahal salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah khususnya yang termasuk kedalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Nurmiati, dkk, 2019). Menurut Cahyaningrum (2018), kebanyakan BUMD di seluruh Indonesia masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional perusahaan. Rendahnya kualitas BUMD juga mengakibatkan BUMD belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Rendahnya kualitas BUMD tidak terlepas dari belum dikelolanya BUMD dengan baik berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian dana yang dikeluarkan untuk penyertaan kepada perusahaan daerah belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan dalam pendapatan asli daerah (Sukarmi dan Budiasih, 2016). Dengan demikian meningkatnya jumlah BUMD belum tentu mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Wicaksono (2018) pemerintah daerah seharusnya bisa mengoptimalkan pembentukan dan penggunaan badan usaha milik daerah (BUMD) yang kemudian dapat memberi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) Proporsi Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 2) Kemakmuran berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan 3) Jumlah BUMD tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan yang dimiliki penelitian ini yaitu hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu, variabel proporsi belanja modal, kemakmuran dan jumlah BUMD serta sampel terbatas hanya pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada periode 2014-2018.

### **Saran**

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya, variabel independen yang digunakan sebaiknya ditambah sehingga dapat diketahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Serta bagi penelitian selanjutnya mungkin bisa membandingkan antara kemandirian keuangan daerah satu dengan yang lainnya yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda, misalnya pulau Jawa dan luar pulau Jawa sehingga dapat dilihat pemerataan dari kemandirian keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., dan M. Sakata. 2002. Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics*. 52: 93-108.
- Apriana, D., dan R. Suryanto. 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. 11(1): 68-79.
- Ariani, K.R., dan G.A. Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*. 2016: 364-369.
- Arif, M., dan F.I. Arza. 2019. Analisis Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(1): 35-49.
- Asatryan. Z., L.P. Feld, dan B. Geys. 2015. Partial fiscal decentralization and sub-national government fiscal discipline: empirical evidence from OECD countries. *Springer Science and Business Public Choice*. 163: 307-320.
- Badan Kebijakan Fiskal & World Bank. (2011). *Analisis Hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pelayanan Dasar Publik di Indonesia*. Decentralization Support Facility. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017*. BPS. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019a. *[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi*. BPS. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2019b. *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2018*. BPS. Jakarta.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Blanchard, O., dan D.R. Johnson. 2012. *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson Education: New York.
- Borge, L.-E., J.K. Brueckner, dan J. Rattso. 2014. Partial fiscal decentralization and demand responsiveness of the local public sector: Theory and evidence from Norway. *Journal of Urban Economics*. 80: 153-163.
- Campo, S., dan P. Sundaram. 2001. *To Serve and To Preserve : Improving Public Administration in A Competitive World*. Asian Development Bank. Philippines.
- deMello, L. (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. *World Development*. 28(2): 365-380.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2016. *Laporan Realisasi APBD 2014 (Ringkasan)*. DJPK. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017a. *Laporan Realisasi APBD 2016 (Ringkasan)*. DJPK. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017b. *Laporan Realisasi APBD 2015 (Ringkasan)*. DJPK. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019a. *Laporan Realisasi APBD 2018 (Ringkasan)*. DJPK. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2019b. *Laporan Realisasi APBD 2017 (Ringkasan)*. DJPK. Jakarta.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, D.N & Porter, D.C. (2010). *Basic Econometrics, Fifth Edition*. New York: The McGraw-Hill.
- Groves, S. M., W.M. Godsey, dan M.A. Shulman. 2001. Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association* 9: 243-255.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harianto, D., dan P. H. Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Per Kapita, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*. 26-28 Juli 2007: 1-26.
- Haryanto, J.T. 2015. Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>. 4 Desember 2019 (15:17).
- Hersey, P., dan K. Blanchard dalam Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hirawan, S.B. 2006. Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 6(2): 63-82.
- Imawan, R., dan W. Agus. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal* 3(2): 147-155.
- Iqbal, M. 2015. Regresi Data Panel (1) “Pengenalan”. <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-1-pengenalan/>. 3 Juli 2020. (8:43)
- Ismail, F. 2018. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Jia, J., S. Ding, dan Y. Liu. 2020. Decentralization, Incentives, and Local Tax Enforcement. *Journal of Urban Economics* 115: 103-225.
- Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1(1): 28-35.
- Mankiw, N. G. 2006. *Makroekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mogues, T., dan S. Benin. 2012. Do External Grants to District Governments Discourage Own Revenue Generation? A Look at Local Public Finance Dynamics in Ghana. *World Development*. 40(5): 1054-1067.
- Murhadi, W.R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba Empat. Jakarta.

- Novalistia, R.L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting* 2(2): 1-25.
- Nugraha, Y.N. 2019. Desentralisasi dan Ketergantungan Fiskal Daerah. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia>. 4 Desember 2019 (21:41).
- Nurkholis, dan M. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press. Malang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02 Tahun 2011 *Klasifikasi Anggaran*. 11 Juli 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 54 Tahun 2017 *Badan Usaha Milik Daerah*. 28 Desember 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305. Jakarta.
- Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Putri, T.K., Boedijono, dan H. Rohman. 2014. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember. Jember.
- Rondinelli, D. A., J. R. Nellis, dan G. S. Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. World Bank. Washington.
- Sambow, D.F., G.M.V. Kawung, dan A. Tenda. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(4): 247-259.
- Santoso, S. 2006. *Seri Solusi Bisnis Berbasis TI: Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, S. 2019. *Mahir Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sari, P.I. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*. 2015: 537-545.
- Sasasna, H. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18(1): 46-58.

- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). 2017. *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Seknas FITRA. Jakarta.
- Setyaningrum, D., dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9(2): 154-170.
- Sidik, M. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar "Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia"*. 13 Maret 2002: 1-23.
- Stein, E. 1999. Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America. *Journal of Applied Economics*. 2(2): 357-391.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sukarni, N. W., & Budiasih, I. N. 2016. Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2016), 545-572.
- Susanto, E. D., dan H. Murtini. 2015. Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal* 4(4): 1-9.
- Tahar, A., dan M. Zakhiya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 12(1): 88-99.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Wicaksono, K.A. 2018. Membentuk BUMD demi Kemandirian Ekonomi. [https://surabaya.bisnis.com/read/20180406/250/780855/raster-membentuk-bumd - demi-kemandirian-ekonomi](https://surabaya.bisnis.com/read/20180406/250/780855/raster-membentuk-bumd-demi-kemandirian-ekonomi). 5 Desember 2019. (09:02)
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan Eviews (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.